



Assituruseng:

Hegemoni Budaya Dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa

A. M. Yusuf

Lokus Research and Consulting (LRC). E-mail: andi.oetjho@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Assituruseng; cultural values; hegemony; political practice; power.

How to cite:

Yusuf, A.M. (2017). *Assituruseng: Hegemoni Budaya Dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa*. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*. 2(1):74-94.

ABSTRACT

Local cultural symbols have been used massively along with the spirit of primardialism, substituting javaneseeness nationalism of the New Order. This article aims to examine Bugis cultural values and the shift of meaning used as the preference in the political practice that support power relations. To the present, in the era of local autonomy, the old order has reborn in Buginese culture and force the cultural legitimacy, such as reproduced values and eve more related the political practices and power struggles. Such tendency has resulted in the division of Belawa community into two groups those who geneologically have political power (anakarung) and those who have not. This has formed a patronage structure relationship based on delicate agreement (assituruseng). Such a values has cultural legacy which is then reproduced as an instrument in the political practice and maintain power domination by anakarung. Such a strategy is a hegemonic effort, utilizing various components of Bugis cultural through symbols and adages.

Copyright © 2017 ETNOSIA. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Budaya lokal, identitas lokal, hingga masalah peninggalan nilai-nilai budaya sampai hari ini terbilang masih cukup kuat dijadikan instrumen dalam berbagai domain, diantaranya adalah simbol-simbol budaya daerah yang belakangan cukup masif muncul diberbagai ranah dengan semangat primordialismenya menggantikan nasioanalisme ke-Jawa-an Orde Baru. Fenomena ini dapat diamati di lingkungan sekitar kita dan terpampang di berbagai sudut maupun ruang-ruang publik lainnya. Di Bali, misalnya, upacara-upacara kepercayaan disulap menjadi peragaan pariwisata hingga seragam tradisional etnis ramai dalam baliho-baliho kampanye dan begitu pula adagium-adagium budaya

digunakan dengan berbagai purwarupa. Demikian budaya menjadi kekuatan penting dalam ranah politik dan itu artinya pedoman, jalan pikiran, serta orientasi diperlukan dalam membangun pemahaman pada setiap penelitian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Geertz bahwa cukup sulit untuk berbicara politik jika tidak mendasarkan analisis pada aspek budaya (Anderson 1990:37).

Nilai-nilai budaya lokal mewarnai corak politik di era otonomi daerah. Idiom-idiom budaya tetap saja direproduksi, penegasan identitas, pengetahuan, begitu pula dengan praktik-praktiknya (Almond dan Verba 1984: 86). Jika mencermati budaya politik sebagai bagian dari cara pandang individu yang merupakan wujud dari rangkaian-rangkaian peristiwa sejarah yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, maka ini diwariskan turun-temurun berupa tatanan nilai dan norma perilaku. Hal ini terlihat dari kecenderungan kelompok-kelompok elit, upaya mereka dalam mendominasi ranah dalam kehidupan demokrasi menunjukkan karakteristik, kekuatan etos, serta nilai-nilai budaya lokal. Status kebangsawanan dalam budaya Bugis, misalnya, ditengah-tengah arus demokrasi dan persamaan hak warga negara, justru semakin menguat dalam struktur masyarakat yang terkait dengan praktik politik.

Kebudayaan Bugis memiliki banyak nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakatnya, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa penelitian mengenai alam kebudayaan orang Bugis. Nilai-nilai dalam cerminan sejarah dan wujudnya dalam konteks hari ini menimbulkan ragam analisis, namun jika ditarik secara umum memperlihatkan dua pandangan. Pandangan pertama lebih menekankan bagaimana nilai-nilai budaya dahulu di-reaktualisasikan pada beberapa aspek yang diantaranya adalah penanaman budaya lokal pada tatanan politik atau sebagai model politik (Abidin 1985; Mattulada 1995; Rahim, 2011). Sementara pandangan kedua lebih menafsirkan nilai-nilai budaya telah mengalami pergeseran makna yang menyebabkan kekuasaan di daerah semakin terbuka setidaknya untuk kalangan elit, yakni kecenderungan dominasi kelompok keturunan bangsawan atau dalam bahasa Bugis disebut *anakarung* (Robinson 2005; Pelras 2006; Bakti 2007; Meiyani 2008; Zuhro 2009).

Pada ranah birokrasi dapat ditemui bentuk kepemimpinan formal yang dibarengi dengan karakteristik kepemimpinan dalam budaya lokal. Bila memperhatikan perilaku birokrasi pemerintahan lokal di Kabupaten Wajo, masih kuat dipengaruhi oleh spirit aristokrasi yang berasal dari rentetan

sejarahnya (Arifin 2010:8). Kondisi ini merupakan sesuatu yang masih melekat erat dalam budaya masyarakat Bugis, sehingga pada beberapa aspek menjadi praktik kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, membina ketaatan bawahan, kewibawaan, serta memelihara pengaruh melalui nilai 'hormat'. Sesuatu yang secara simbolik dapat kita lihat pada pelabelan status tradisional seperti *Puang* atau *Andi* dan *Karaeng* pada masyarakat etnis Makassar) yang diberikan kepada para pejabat, terlepas dari apakah dia secara faktual keturunan bangsawan (*anakarung*) atau bukan. Banyak instansi pemerintah yang memelihara nilai-nilai tradisional ini dan masyarakat patuh terhadap kondisi tersebut.

Dengan mengingat kondisi masyarakat kita saat ini yang dituntut banyak standar kemanusiaan berkat lalu-lintas wacana global, maka setidaknya masih kontradiktif bila kita mencermati tentang hak-hak sebagai warga negara serta idealitas dalam demokrasi seperti yang selalu diwacanakan. Membuka kembali lembaran kisah sebuah bangsa atau mendengar cerita tentang para leluhur seakan menjadi romantisme untuk menyelesaikan masalah dan kalau perlu dibangkitkan ataupun direvitalisasi kembali. '*Tempus mutantur, et nos mutamur in illud*', waktu berubah dan kita pun ikut di dalamnya, pepatah latin kuno ini sudah jauh-jauh hari ingin mencerminkan pada kita hal ihwal perubahan. Tentang orang Bugis pada masa lalu seperti yang diceritakan dengan kekinian menuntut telaah yang sedemikian rumit, terutama ketika berbicara mengenai budaya dan tata nilai yang membentuk perilaku politik dan kekuasaan dalam corak masyarakat Bugis.

Tafsir teks dan narasi kebudayaan dalam sejarah dan konteksnya hari ini perlu dicermati. Begitu pula dalam memahami bentuk transformasi simbolik dan nilai-nilai dalam budaya Bugis terhadap dinamika perubahan sosial. Dengan tidak hanya melihat sisi politik dengan formalitasnya dalam tatanan negara, tetapi penting untuk mengungkapkan aspek yang menyoroti kekuatan dan pengaruh dari tatanan nilai-nilai dan budaya masyarakat Bugis. Untuk itu, penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi kualitatif mengenai hubungan unsur-unsur hegemoni yang instrumental dalam budaya lokal dan kecenderungannya sebagai preferensi praktik-praktik politik dan relasi kekuasaan.

2. Metode Penelitian

Aktifitas penelitian lapangan (pengumpulan data) dilakukan di Kecamatan Belawa, sebagai lokus yang memiliki dinamika aspek kesejarahan masyarakat Bugis. Masyarakatnya mayoritas beretnis Bugis yang menjadi alasan utama kerangka penelitian nilai-nilai budaya Bugis dalam tulisan ini. Belawa

merupakan wilayah yang dahulu terdapat sistem *akkarungeng* (kerajaan kecil) dan memiliki interaksi antar struktur masyarakat yang coraknya sesuai dengan asumsi praktik politik orang-orang Bugis. Kecamatan Belawa berada di wilayah administratif Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis wilayahnya terbentang dengan luas wilayah 172,3 km², terletak di perbatasan bagian timur Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Pengumpulan data mengandalkan hasil wawancara dengan orang yang merupakan *anakarung*, pejabat/mantan pejabat desa (kepala dan sekertaris desa), serta tokoh masyarakat yang cakap dalam mengutarakan budaya Bugis seperti yang dicantumkan pada **Tabel 1** berikut:

No.	Nama	Posisi/Status
1.	Andi Oddang Tosesssengriu	Pemangku Adat Addatuang Luwu/ Pakar Budaya Bugis
2.	Andi Ading	Tokoh Masyarakat, <i>anakkarung</i> , penguasaha penggilingan padi
3.	Andi Baru	Tokoh Masyarakat, <i>anakkarung</i> , penguasaha penggilingan padi
4.	Andi Kile	Tokoh Masyarakat, <i>anakkarung</i> , penguasaha penggilingan padi, mantan kepala desa
5.	Nurdin	Kepala Desa
6.	Andi Ulla	Kepala Dusun
7.	Khalik	Tokoh Masyarakat, petani, mantan sekertaris desa
8.	Saiful	Guru Sekolah, mantan penilik kebudayaan Kec. Belawa
9.	Andi Isnandar	Tokoh Masyarakat, <i>anakkarung</i> , penguasaha

Topik-topik wawancara meliputi makna nilai *assituruseng*, *ajjoareng*, dan nilai-nilai yang terkait praktik kekuasaan pada masyarakat Bugis; peristiwa suksesti pemilihan kepala desa; stratifikasi sosial; norma-norma yang mengikat sikap dan perilaku *anakarung*; dan kebiasaan informan dalam kebiasaannya berkumpul dan berbicara (*mappanrung*). Data-data mengenai kebiasaan duduk, bagaimana berkumpul, gestur saat berbicara, dan topik yang dibicarakan pada saat *mappanrung* dilakukan dengan teknik observasi. Sementara itu, telaah terhadap dokumentasi sejarah yang terkait dengan Belawa untuk memahami narasi-narasi dan identitas kultural dalam sejarah orang-orang Belawa. Data-data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan sub-sub topik yang saya disusun sebelumnya, dikodekan berdasarkan kategori yang selanjutnya diinterpretasikan dan dinarasikan secara kualitatif.

Izin penelitian di Kabupaten Wajo saya peroleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Wajo. Izin selanjutnya saya teruskan ke Kecamatan Belawa, dengan demikian saya resmi mendapat izin melakukan kegiatan penelitian di wilayah tersebut. Saya mengutarakan tujuan penelitian saya setiap kali melakukan wawancara dan mengikuti (mengobservasi) informan. Begitu pula saat saya meminta untuk ditunjukkan manuskrip atau data yang berbentuk dokumen.

3. Narasi Sejarah Orang Belawa

Pada masa Hindia-Belanda, wilayah-wilayah Bugis terbagi kedalam *onder-afdeling*. Namun oleh masyarakat Bugis, pembagian ini tidaklah berpengaruh dan lebih mengenal pembagian wilayah berdasarkan *wanua* atau perkumpulan banyak kampung. Belawa juga merupakan sebuah *wanua*, yang sebelumnya terbagi atas dua, yakni *Wanua Belawa Orai* dan *Wanua Belawa Alau* dibawah konfederasi kerajaan Wajo. Pembagian itu mengindikasikan bahwa Belawa merupakan wilayah (domain) dengan kekuasaan tersendiri, yang oleh Mattulada (1985: 408) dikaitkan dan menyerupai konsep pemerintahan 'demokrasi aristokrat'. Hubungan politik dan sistem konfederasi di Wajo dan banyak wilayah-wilayah (*wanua*) didalamnya sebagai domain tersendiri, termasuk Belawa pada masa itu.

Sejarah-sejarah tersebut sebenarnya menimbulkan sebagian perubahan saja, sementara karakteristik sebagai bekas *wanua* memiliki kecenderungan tetap bertahan. Ini membentuk konstruksi identitas masyarakatnya, serta simbol-simbol dimana mereka lebih ingin disebut sebagai orang Belawa ketimbang dikatakan sebagai orang Wajo. Dalam kaitan dengan ini, Saiful, salah seorang mantan guru sekolah dan penilik kebudayaan, budaya di Kecamatan Belawa mengatakan 'kita ini memang berada di wilayah Wajo, tapi kita ini orang Belawa, dari sejak dahulu kita lebih dikenal sebagai *tosagena* (berkecukupan)'. Dalam konteks tersebut, Saiful berusaha menjelaskan identitasnya sebagai orang Belawa dengan karakteristik sosio-kultur yang seakan berbeda dengan Wajo, meskipun mereka adalah orang Bugis. Ia sangat memahami atribut-atribut kebudayaan orang-orang Bugis Belawa, karena pernah bekerja sebagai dekorator sewaan setiap acara resepsi pernikahan khas Bugis di Belawa.

Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Belawa umumnya didapatkan melalui *lontara* atau manuskrip sejarah yang biasanya disimpan sebagai benda pusaka oleh orang-orang keturunan bangsawan (*anakarung*) seperti yang ditunjukkan Andi Oddang Tosessengriu, salah seorang tokoh adat dari

Belawa yang saat ini menjabat sebagai Arung Pabbicara (Humas) di Kedatuan Luwu). Menurutnya naskah atau manuskrip garis silsilah tidak sepatutnya ditunjukkan pada sembarang orang kecuali kepada kerabat yang telah dikenal), apalagi disalin, karena sejak lama sering kejadian pencurian garis keturunan (lihat **Gambar 1**). Sementara, muatan tulisan *lontara* lainnya tentang Belawa lebih banyak ditekankan pada pencatatan peristiwa, terutama dalam lingkaran para *Arung* (penguasa *wanua*) yang menggambarkan tindakan-tindakan, perintah-perintah, aturan-aturan, silsilah garis keturunan dan adat-istiadat atau hukum. Bahkan nuansa yang diceritakan dalam *lontara* sarat dengan peristiwa konflik atau kisah saling menguasai antara *arung* yang satu dengan *arung* yang lainnya. *Lontara* justru menjadi representasi milik para *arung*, yang memainkan peran dalam narasi budaya dalam satu permainan dinamika.



Gambar 1. Replik Stambom

4. Unsur-unsur Budaya Bugis Yang Hegemonik

Hegemoni yang instrumental pada preferensi praktik-praktik politik dan relasi kekuasaan yang bersumber dari budaya lokal. Hal ini ditunjukkan dalam dinamika masyarakat dalam rentetan sejarah dan bentuk kekuasaan serta ideologi di bangun dalam masyarakat tersebut. Bentuk-bentuknya terwujud dalam petuah-petuah, mitos maupun kronik raja yang menceritakan langsung dan diterjemahkan sebagai bangunan pranata politik dan kekuasaan dalam masyarakat di masa lalu (Rudiansjah 2009:291). Pranata politik yang diciptakan sebagai sarana organisasi untuk mempertahankan diri dari serangan luar, akan tetapi struktur kekuasaan juga memberi sarana kepada kelas yang berkuasa untuk mengabadikan kekuasaannya, demi untuk mempertahankan secara secara politik kekuasaan antara pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.

Kelompok masyarakat dengan sistem penguasa *akkarungeng* (kebangsawanan) di Belawa telah diindikasikan oleh Pelras (2005:47), sebagai karakteristik

keberadaan jaringan *patron-klien* yang begitu meresap pada masyarakat Bugis, yang menyebabkan banyak wilayah *wanua* atau *akkarungeng* memiliki kekuasaan tersendiri yang dikepalai oleh *arung* terdesentralisasi dan terpisah dari pusat. Di Kecamatan Belawa (sebagai bekas *wanua*) pemimpin birokrasi umumnya memiliki keterkaitan erat dengan keturunan *arung*. Indikasi yang menunjukkan kesan kekuasaan yang direproduksi yang ditunjukkan oleh beberapa *anakarung* atau keturunan bangsawan (Millar 2009:35). Implikasi seperti itu merupakan proses pengorganisasian dan birokrasi peninggalan Hindia-Belanda ketika dalam penguasaan wilayah tetap memperhatikan pengaruh penguasa lokal (*arung*) terhadap masyarakatnya (Nordholt 2002:76). Proses sejarah di Belawa merupakan konstruksi sosial yang diinterpretasi dalam penelitian ini, menggunakan sumber-sumber sejarah bukan hanya untuk memperkuat reproduksi budaya, tetapi untuk mempertanyakan langsung jenis-jenis pengetahuan kultural yang menjadi dasar narasi orang-orang Belawa.

Implikasi dari tatanan masyarakat dengan pola pelapisan sosial menyebabkan relasi antar individu yang menempatkan masyarakat situasi satu kelompok pada lapis atas. Dengan asumsi itu, terdapat kecenderungan kelompok atas mereproduksi status ataupun sifat hak istimewa dari seorang *anakarung* (Yusuf 2012:15). Penempatan status sosial oleh kalangan lapis atas sebagai suatu privilese atau hak memimpin yang dalam bentuk bagaimana kekuasaan dipertahankan umumnya dilakukan dengan mereproduksi *stretip-stretip* tentang siapa yang layak dan siapa yang tidak layak yang dikenakan pada kelompok lapis bawah atau pengikut (Tahara 2014:27). Kecenderungan kelas yang didominasi adalah mengikuti budaya kelas dominan dan pola-pola pikiran mereka yang dilegitimasi dalam suatu nilai persetujuan atau dalam konsep tulisan ini saya menyebutnya *assituruseng*.

Masyarakat umumnya hanya menyepakati aturan yang telah dibuat, terkadang tidak menyadari peran mereka dalam aturan itu dibuat dan dijalankan (Bouchier 2010:126). Sebagaimana memahami struktur masyarakat Bugis yang masih sarat pelapisan sosial peninggalan aristokrat, kecenderungan relasi antara *anakarung* sebagai elit dan masyarakat dibingkai dalam nilai budaya yang disebut *assituruseng*¹. Indikasinya, konsep *assituruseng* diawal merupakan

¹ *Ade assituruseng* diartikan sebagai bentuk 'kesepakatan' antara Puang Rimaggalatung dengan Datu Luwu pada masa perang melawan Sidenreng; Sementara pemaknaan lainnya adalah ketentuan yang disepakati oleh berbagai pihak yang mengikat semua pihak yang bersepakat itu. Istilah *situru* memiliki kata padanan yakni *maccoe* yang juga diartikan 'mengikuti, namun sifatnya lebih pasif. Sementara *assituruseng* merupakan kata bentuk dan sifatnya aktif yang konteksnya tepat antara dua belah pihak yang bersepakat. Ketika penelitian ini sedang berjalan,

bentuk praktik politik yang ditunjukkan dalam sejarah Belawa ini, pada dasarnya memiliki struktur dengan ciri dalam setiap kegiatan politik (McGlynn dan Tuden, 2000:3). Tindakan-tindakan yang ada di dalamnya kemudian dikatakan berdasar pada kewenangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam budaya masyarakat Belawa.

Pemaknaan dalam penelitian ini menunjukkan nilai *assituruseng* bersifat instrumental menjadi alat yang pada kondisi tertentu dapat merubah salah sikap pada diri orang Belawa. Jika disepakati itulah yang mereka lakukan, karena sebagai wacana ia mampu mengerakkan dan memobilisasi massa (Strinati 2009:257). *Assituruseng* menjadi piranti yang digunakan untuk mempengaruhi dan dan dijadikan senjata untuk mendominasi satu individu atau kaum/kelompok yang melebur bersama kedudukan sosial untuk tujuan subordinasi. Dengan pengertian tersebut maka dapat diinterpretasi adanya saling kesinambungan nilai-nilai lokal dalam sejarah Bugis dengan kondisi perubahan (Bakti 2009:492). Kondisi-kondisi dan hubungan sosial tetap menjadi patokan berubahnya unsur yang ada dalam nilai-nilai lokal. Sehingga pada titik itulah kemungkinan besar *assituruseng* yang dilakukan orang dahulu mengambil peran terhadap pengaturan-pengaturan (regulatif) realitas perubahan. Jika ditelaah lagi *assituruseng* menjadi konsep kunci keseharian masyarakat pada satu tingkatan tertentu dengan memperhatikan nilai yang lebih besar, dimana ketentuan nilai-nilai lainnya bisa saja didegradasi dengan kesepakatan yang baru berdasarkan *assituruseng* (permufakatan).

Konsep kebangsawanan belum sepenuhnya tergerus dalam perubahan sosial masyarakat di Belawa. Kecenderungan ini terlihat pada masyarakat yang masih memperhitungkan status tradisional keturunan bangsawan (*anakarung*) sebagai modal simbolik yang signifikan. Beberapa istilah kekerabatan yang dikenal dalam orang Belawa, pada umumnya didepan namanya selalu ditambahkan istilah *Andi* atau *Puang* yang merujuk pada status sosial *anakarung*. Untuk mempertahankan status sosialnya pada sistem kekerabatan, orang Belawa memprioritaskan perkawinan dikalangan kerabat sendiri yang disebut *siampaiko masseajing, tenri batu malepang*. Perkawinan antar lapisan sosial sebenarnya sejak dahulu dilakukan, dimana pihak perempuan yang statusnya tinggi harus dibayar oleh pihak laki-laki yang meminangnya agar kedudukan sosialnya setara namun tidak pada status kebangsawanan yang melekat (*given*). Fenomena ini merupakan adat Bugis yang disebut *mangelli dara*.

saya juga menemukan penyebutan lain yang disebutkan yakni '*assisamaturuseng*' yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan antara orang banyak atau jamak.

Dalam penelitian ini mengemukakan satu kasus perkawinan Abdullah dan Andi Sanawiyah. Abdullah adalah laki-laki Bugis yang bukan merupakan *anakarung*, akan tetapi selama dalam perantaunnya di Samarinda ia membangun usaha besarnya sehingga berhasil mendudukkannya dalam posisi ekonomi yang cukup berada yang dalam Bugis diistilahkan *tosugi*. Sehingga dapat dikatakan Abdullah merupakan individu yang memiliki kemampuan melakukan dominasi ekonomi. Sementara Andi Sanawiyah merupakan *anakarung* yang telah memiliki modal simbolik dalam pelapisan sosial serta memiliki kerabat dengan jaringan luas terhadap orang-orang yang berpengaruh.

Jaringan kerabat dan kedudukan sosial tersebut mengindikasikan Andi Sanawiyah memiliki kekuatan dalam politik dan kekuasaan meskipun hanya pada tingkatan patronase kecil. Faktor kedudukan sosial Abdullah kemudian menjadi pertimbangan keputusan keluarga Andi Sanawiyah yang awalnya tidak mau menikahkannya dengan keluarga lain selain dari kalangan kerabatnya sendiri. Tuntutan perubahan dalam masyarakat berimplikasi pada konsepsi pelapisan sosial yang berasal dari nilai-nilai tradisional berpadu dengan nilai-nilai ekonomi sehingga mampu merubah persepsi kerabat Andi Sanawiyah terhadap kedudukan sosial Abdullah sebagai *tosugi*.

Upaya dalam merebut kedudukan sosial menjadi salah satu motivasi tertinggi orang-orang Belawa. Di samping itu, dikalangan keturunan bangsawan (*anakarung*) sekalipun, persaingan merebut jabatan kadang berlangsung sengit karena suksesi jabatan pada saat sekarang ini tidak lagi mengikuti jalur keturunan yang ketat tetapi kebanyakan melalui pemilihan. Untuk mencapai kedudukan-kedudukan sosial, orang Belawa dibekali dengan semangat dan etos yang terkandung dalam nilai *reso*. Nilai budaya *reso* diterjemahkan sebagai suatu 'kerja keras' dan 'usaha'. Semangat *reso* pada diri orang-orang Belawa menjadi pemantik untuk mengejar kedudukan sosial yang tinggi seperti *to sugi* (orang kaya, pengusaha); *to acca* (berpendidikan, gelar akademik) dan *to mapparenta* (pemimpin, figur politik). Hal ini merupakan reproduksi budaya sebagaimana yang digambarkan dalam karakter para '*arung*' (pemimpin) dengan berbagai kelebihan-kelebihannya pada masa lalu.

Menjadi pemimpin, dalam karakteristik budaya orang Belawa terdapat kecenderungan patron-klien atau dalam bahasa Bugis disebut *ajjoareng*. '*Iko anging naiya daung'na* demikian adagium yang sangat terkenal pada masyarakat Bugis. Konsep ini menggambarkan nilai *assituruseng* (persetujuan) antara pemimpin dan pengikut (*ajjoareng*). Jadi bentuk-bentuk kepemimpinan maupun relasi sosial masyarakat di Belawa tidak bisa dilepaskan antara

assituruseng dan *ajjoareng*. Pemimpin dipilih dan disetujui dari kelompok keluarga tertentu, jadi rekrutmen kepemimpinan itu diambil dari bagian sangat kecil dari seluruh masyarakat. Pada pelapisan sosial di Belawa yang mengenal *arung* (bangsawan), para pemimpinnya biasanya direkrut hanya dari *anakarung* (keturunan bangsawan), jarang terjadi pemimpin dari kelas bawah terpilih. Seorang pemimpin diseleksi dari jajaran kemungkinan yang bahkan lebih kecil dari mereka berasal dari keturunan para saudara laki-laki dan perempuan dikalangan *anakarung*. Disamping adanya orientasi kelompok dalam penyeleksian kepemimpinan, masyarakat Belawa mempunyai kriteria terhadap nilai kebangsawanan yang mereka tuntut dari para pemimpin mereka.

Pada prosesi pemilihan pemimpin yang menyisakan nilai-nilai dalam budaya Bugis, model kepemimpinan mengindikasikan hubungan-hubungan kekuasaan atas dasar persetujuan bersama antara pemimpin dan pengikut yang disebut *assituruseng*. *Assituruseng* dimaknai sebagai nilai satu individu yang mengikuti khalayak dan suatu sikap persetujuan secara sadar untuk suatu kondisi tertentu, bisa adat dan norma dalam budaya. Dalam budaya orang Bugis di Belawa, nilai *assituruseng* melengkapi bahkan melegitimasi pola-pola pelapisan sosial pada model pemimpin-pengikut (*ajjoareng*). Manakala pejabat yang disebutkan bahwa *anakkarung* yang dihormati diberi tugas yang antara lain membantu memutuskan suatu kebijakan sekaligus perlindungan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran bahwa apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh pemimpin baik dan berguna untuk kepentingan bersama. Kesadaran demikian biasanya dimantapkan oleh tindakan para pengikutnya yang menyerahkan kesetiaan dan pengabdian kepada pemimpinnya. Relasi ini merupakan bentuk kekuasaan ini tidak menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai kemauan para pemimpin.

Nilai-nilai dan norma dalam masyarakat yang bermanifestasi dalam pernyataan-pernyataan yang dikeramatkan dijadikan ideologi, seperti konsepsi *assituruseng* yang merupakan suatu mekanisme untuk melahirkan suatu paham tentang bagaimana membangun kesepakatan atau persetujuan. Hal ini biasa diilustrasikan sebagai bentuk pertemuan yang terlembagakan dalam masyarakat Belawa seperti ungkapan '*Narekko riduai, rebbai seddie, oncoppesi narekko ritelluiwi*' (Bila dua diantaranya telah memutuskan, maka salah satunya digugurkan, terlebih apabila diputuskan dari ketiganya). Umumnya, *assituruseng* ditempuh untuk mengatasi suatu persoalan yang belum diatur dalam adat atau kebiasaan masyarakat. *Assituruseng* bisa dikatakan menjadi

sumber pengabsahan kekuasaan pemimpin di sisi lain dan merupakan perwujudan keseimbangan kekuasaan antara pemimpin dan pengikut pada masyarakat Belawa.

5. *Panrung*: Antara *Assituruseng* dan *Pertunjukan Hegemoni*

Panrung (balai kecil), tempat kecil yang ukuran panjangnya tidak pernah melewati 5 meter persegi. Berdiri diatas tanah dengan keempat penyangganya dan diberikan alas papan kayu ataupun bambu diatasnya hingga bentuknya menyerupai meja. Susunan papan kayu sengaja dipasang agak berjarak sehingga akan terasa kesejukan angin dari bawah bila kita berada diatasnya. Sisi belakang *panrung* adalah bagian terdalam yang menjadi wilayah empunya atau pemilik rumah, dan sisi depan adalah bagian terluar tepat menghadap masuk keluarnya orang yang ingin duduk dan menjadi wilayah tamu. Penempatan *panrung* hampir menyerupai pembagian ruang dalam rumah, bagian dalam untuk empunya rumah dan bagian luar untuk menerima tamu. Di banyak rumah panggung di Belawa, pada siang hari saat terik matahari menjulang, *panrung* menjadi tempat beristirahat atau berbincang-bincang dengan anggota keluarga maupun tetamu yang datang.

Mappanrung adalah kegiatan meluangkan waktu yang paling digemari oleh orang-orang di Belawa, biasanya dilakukan pada saat siang menjelang sore hari. Laki-laki maupun perempuan berkumpul saling bertukar komentar, atau orang-orang tua yang tidak jarang membahsa tentang masalah usaha/dagangan. Kebiasaan duduk *mappanrung* menyisahkan kerinduan manusia-manusia Bugis akan sejarah akan kesahajaan. Saya katakan demikian, ketika kebanyakan orang-orang yang disibukkan dengan pekerjaan dan akhirnya lupa untuk memberikan waktu luang untuk sekedar merefleksikan sebagaimana orang Bugis dahulu yang suka *mannawa-nawa*. Pelras (2005: 47) menyebutkan bahwa salah satu kelebihan orang Bugis adalah kemampuan memanfaatkan waktu untuk menikmati hidup dan jerih payah yang diperoleh, dengan kata lain, dianggap berkecukupan (*masagena*). Banyak orang yang sudah memiliki rumah yang bagus tapi masih menempatkan *panrung* di sudut luar rumahnya untuk menegaskan dirinya bahwa kamilah orang Bugis dan menggambarkan bagaimana keseharian masa kanak dengan cerita-cerita, seperti epos maupun kisah nenek moyang orang Bugis.

Tidak sulit menemukan benda ini karena untuk sebuah rumah panggung di Belawa sebagian besar memiliki *panrung* dan digunakan utamanya sebagai sarana berkumpul dan beristirahat yang kemudian ditempatkan di bawah

rumah agar mendapatkan suasana yang nyaman. Jika orang-orang sedang berkumpul, memuat tiga hingga enam orang dapat duduk di atas *panrung*, duduk melingkar pada keempat sisinya, ditengah dibiarkan kosong –kadang diisi dengan sajian makanan/minuman- sambil berhadap-hadapan jika perbincangan sudah sangat serius. Hanya sang pemilik yang boleh duduk di bagian terdalam, terlebih lagi jika dia adalah seorang yang lapisan sosialnya tinggi dan orang lainnya hanya boleh duduk pada sisi luar mengelilingi. Bahkan jika dia seorang suruhan tidak jarang hanya duduk dengan separuh tubuhnya persis disudut *panrung* bagian luar, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.

Seperti yang digambarkan diatas, posisi duduk dan pembagian ruang tersebut patut untuk diperhatikan dan kadang tidak dapat dimaknai sepintas. Karenanya dalam persepsi biasa kita mengamatinya hanya sebagai kebiasaan santai keluarga saja. Perilaku ekspresif dalam pembagian ruang dan posisi duduk itu menyiratkan adat kebiasaan bahkan nilai-nilai kepatutan dalam budaya orang Belawa, meski tidak begitu ketat dan hanya dapat ditemui pada situasi-situasi tertentu seperti yang saya coba tafsirkan. Walhasil *panrung* menjadi ajang interaksi dengan suatu struktur perifer, sekaligus memperlihatkan hubungan sosial yang pelik dan kompleks pada orang-orang Bugis. Gambaran ini kemudian menggiring saya untuk mengangkat tema tentang orang Belawa dan sarana *panrung* (*mappanrung*) sekaligus menjadi pintu masuk bagi saya untuk memahami budaya orang Belawa dengan memperhatikan praktik-praktik dan nilai-nilai budaya yang berkorelasi didalamnya.

Kebiasaan *mappanrung* menyisakan telaah terhadap hubungan yang demikian kompleks, jaringan kekerabatan dan hubungan sosial lainnya digambarkan pada tempat sekecil itu. Dalam pemikiran saya, disitulah bentuk-bentuk struktur yang dalam penelitian ini saya konsepsikan, terbangun dan dengan sendirinya memberikan citra kualitatif dari stratifikasi sosial yang lebih empirik dalam hubungan orang-orang Bugis yang rumit itu. Jika tidak, bagaimana harus memahaminya dan memberikan pemaknaan? Sementara dalam penelitian-penelitian pada umumnya mengangkat tema-tema sejarah orang Bugis-- sebelumnya lebih banyak menggunakan dokumen-dokumen semacam naskah *lontara* ataupun sejarah yang mencatatkan situasi sosial yang lebih mengilustrasikan yang masih menyisakan komponen sosial dan lapisannya secara eksplisit. Oleh karena itu, memaknai struktur sosial orang Bugis jika yang dimaksud masa lampau tersebut tidak akan begitu sulit.

Dalam hal ini, saya menyadari betul bagaimana orang-orang Belawa memahami *panrung* jika hanya dimaknai secara artikulatif dan terberi sebagai 'tempat', tetapi posisi saya sebagai pengamat tentu tidak perlu menyepelekan bentuk hubungan-hubungan sosial yang terilustrasi dalam interaksi dalam kebiasaan *mapanrung*. Pemikiran-pemikiran reflektif dan pengetahuan konseptual menggiring pemaknaan *panrung* tersendiri sebagai wadah pranata organisasi sosial serta kebiasaan *mappanrung* sebagai ruang publik orang Belawa. Jika dihubungkan dengan pandangan filsuf Habermas (dalam Rianne 2014:1), maka konsep ruang publik sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari hiruk-pikuk negara bahkan jauh dari jangkauan dari orang-orang membicarakan negara. Sebagaimana *mappanrung* sebagai kebiasaan berkumpul orang di Belawa mampu menjadi ruang publik yang terbangun berkat kebudayaan orang Bugis sendiri sehingga tetap bisa digunakan sebagai konsep (ideal). Berkumpul dan berbicara di *panrung* memastikan bahwa setiap orang memiliki akses untuk menjadi pengusung suara-suara setiap orang. Opini-opini yang bermunculan dalam setiap obrolan di *panrung*, menjadi sumber dorongan emansipasi, dan cukup berperan untuk memengaruhi, secara informal, termasuk perilaku-perilaku yang ada dalam 'ruang' yang lebih luas.

Pengalaman saya tentang memaknai *panrung* tidak cukup sebagai ajang yang eksklusif dan partikularistik, tetapi justru ruang yang menyiratkan hubungan dari praktik-praktik dominasi dimana pelapisan sosial dapat disimak. Konsep *panrung* ini mendemonstrasikan akar-akar dari 'aksi instrumental atau strategis' dan aksi komunikatif. Dengan menjadi rumah bagi aksi komunikatif, 'dunia-kehidupan' memungkinkan para orang-orang yang terlibat didalamnya mencapai tujuannya secara kooperatif dengan pemahaman akan situasi yang didefinisikan bersama-sama. Dalam konteks ini, konsensus dicapai melalui pertukaran persetujuan dan ketidaksetujuan yang menggunakan logika budaya.

Mappanrung membantu memperkuat jalinan yang mengikat masyarakat menjadi satu: keakraban dan keteraturan, mengubah hari-hari kerja yang melelahkan di sawah, sekaligus ranah untuk mencari suatu titik temu masalah yang dibahas beberapa orang (*assituruseng*). Lebih sekedar meluangkan waktu dan santai pada waktu senggang, *mappanrung* merupakan sumber mendapatkan berita yang saya ibaratkan sebagai mesin dialog masyarakat lokal. Pada awal tahun 2015 ketika menjelang pemilihan Kepala Desa, pertentangan muncul antara Andi Baru (seorang *anakarung*) berambisi untuk memajukan calon yang ia tunjuk sebagai calon kepala desa. Nurdin yang seorang bekas jagoan kampung

yang memang sangat ingin menjadi kepala desa mendapat dukungan dari patronnya Andi Baru yang memiliki pengaruh yang kuat di desa. Masalah muncul karena Nurdin sebenarnya tidak tercatat sebagai penduduk desa.

Hal ini menyebabkan Andi Baru, yang juga seorang Sekertaris Desa, turun tangan menggunakan pengaruhnya kepada Khalik agar dibuatkan surat domisili baru untuk Nurdin. Sementara, Khalik merasa bahwa dengan menerbitkan surat tersebut merupakan tindakan pelanggaran, dan takut suatu hari ia akan mendapat masalah hukum. Polemik akhirnya bergulir, bagaimanapun jika menolak menurutnya harus mendapat dukungan dan restu, ia cukup segan secara terbuka mengungkapkan penolakannya. Satu-persatu penguasa kampung di dusun ia datang untuk membicarakan polemik tersebut, setelah bertemu dengan Ambo Tang (mantan Kepala Desa) ia lalu menemui Andi Ading, seorang patron lain yang lebih berpengaruh dikalangan petani karena kemampuannya mengurus bantuan-bantuan untuk petani di desa. Hampir setiap hari menjelang sore di *panrung* dirumah Andi Ading, Khalik berusaha mengutarakan dan dengan hormat membahasakan secara tersirat penolakannya. Hal ini ia lakukan karena takut Andi Ading yang sebenarnya dekat dan berkerabat dengan Andi Baru justru tidak setuju.

Model kepemimpinan ini kemudian mengindikasikan hubungan-hubungan kekuasaan atas dasar persetujuan bersama antara pemimpin dan pengikut. Manakala pejabat yang disebutkan bahwa *anakarung* yang dihormati diberi tugas yang antara lain membantu memutuskan suatu kebijakan. Hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran bahwa apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh pemimpin baik dan berguna untuk kepentingan bersama. Kesadaran demikian biasanya dimantapkan oleh tindakan para pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan warganya. Bentuk kekuasaan ini tidak menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai kemauan para pemimpin.

Polemik tersebut butuh waktu hampir sepekan bergulir dan dibicarakan di *panrung*, hingga akhirnya Andi Ading, setelah dipengaruhi pula Andi Kile saat itu, menyatakan dukungannya kepada Khalik menolak permintaan Andi Baru. Namun konsekuensi berat dialami Khalik, ketika orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut menyepakati (*assituruseng*) mendukung perlawanan dan penolakan terhadap permintaan Andi Baru, ia justru disarankan agar mengundurkan diri. Suatu jalan yang ditempuh agar tidak terjadi konflik terbuka dan menjaga pertalian (*assituruseng*) antara para *anakarung* di desa tersebut. Meski telah ditempuh jalan demikian, justru dibelakang Andi Baru membuat keputusan berbeda lagi dengan menunjuk Andi Ulla sebagai sekdes

sementara secara sepihak, agar surat domisili Nurdin segera diterbitkan menjelang suksesi kepala desa.

Ideologi saling menghargai - nilai *sipakatau* dimaknai bahwa seseorang dikelilingi oleh orang lain, baik yang posisinya lebih rendah atau tinggi, kepada siapa perlu ditunjukkan ras hormat. Orang harus berbicara dan bertindak dengan santun dan menggunakan istilah-istilah penghormatan yang tepat untuk orang yang statusnya lebih tinggi. Dalam kehidupan sosial, demi kebaikan bersama, kekuasaan orang yang lebih tinggi entah itu *anakarung*, pejabat, ataupun kerabat yang lebih tua harus diterima tanpa dipertanyakan lagi.

Satu kosakata Bugis yang sangat menunjukkan makna penghormatan adalah *tabe*, yang artinya meminta permissi untuk melakukan sesuatu kepada orang yang diajak bicara. Memotong pembicaraan, melintas didepan orang lain atau bila tamu hendak pergi harus dengan sebuah ijin - *tabe*. Terutama pada anak-anak harus meminta ijin kepada orang tuanya ketika mereka akan keluar (*mappatabe*). Ijin selalu diberikan dan ritus minta ijin dalam hal ini bisa diartikan sebagai metode kontrol paternal; bahwa orang yang meminta ijin - *tabe* dari orang tua atau tuan rumah. Hak memberi ijin (*iye*, silahkan) hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan dihormati, yaitu anggota senior dalam keluarga.

Norma menghormati atau *sipakatau*, pada masyarakat Belawa artinya adalah mengetahui letak sosial diri sendiri didalam masyarakat, serta bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tadi. Tata krama, mewajibkan orang untuk menunjukkan penghormatan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, tidak peduli bagaimana perasaan pribadinya. Kecenderungan ini merupakan tata moral dan tindakan untuk menunjukkan subordinasi simbolik, dengan memberikan penghargaan sosial yang lebih tinggi kepada orang lain dalam rangka memelihara kehidupan sosial yang harmonis dan kerukunan masyarakat. Apabila orang tidak mau menunjukkan sikap orang yang sepatutnya, hubungan sosial akan terganggu dan konsensus sosial (*assituruseng*) mudah pecah.

Bila *assituruseng* tergoncang hal ini harus diseimbangkan lagi menuju pada kondisi emosional yang tenang, selamat, kondisi yang sedemikian yang diinginkan oleh orang-orang di Belawa. Walaupun banyak perubahan-perubahan drastis berlangsung selama beberapa dekade dalam sejarahnya nilai-nilai - *sipakatau* - orang-orang tetap melaksanakannya dengan sepatutnya

dalam interaksi sosial. Dosa sosial yang paling besar seprtinya adalah bila seseorang tampil tidak sopan, sombong-sombong, atau mengunggulkan dirinya yang tidak menempatkan dengan baik nilai kepatutan (*sitinaja*). Seseorang yang tidak mampu melihat dan bertindak sesuai dengan perbedaan status dianggap sebagai orang yang memiliki malu (*degaga sirina, denessingngi alena* - tidak punya malu, tidak tahu diri).

Prinsip *assituriseng* jika dimaknai sebagai ikatan kesepakatan untuk menjalankan kerukunan memberi nilai tinggi bagi penghindaran konflik, tempat keinginan, bahkan harapan-harapan pribadi ditekan dan harus mengalah demi kebaikan bersama. Jika sudah terikat *assituruseng*, seperti yang dialami Khalik (Mantan Sekertaris Desa) ketika menceritakan kisahnya. Ia begitu kukuh untuk membuka bengkel motor saat ia masih muda, namun keinginan keluarga dan kerabat-kerabatnya menginginkan ia bersekolah di perguruan tinggi di Makassar agar bisa menjadi guru - IKIP -, dalam pandangan keluarganya, Khalik harus bersekolah sampai tingkat tingkat yang lebih tinggi agar kelak kedudukan sosialnya dapat terangkat. Bagaimanapun ia mengelak akan tetap tunduk pada nilai-nilai yang menjadi pegangannya sendiri dan keluarganya, dan memutuskan untuk mengikuti kesepakatan agar lingkungan keluarga tetap 'sediakalanya' terjalin. Setelah menyelesaikan sekolahnya, meski dengan prestasi akademik yang pas-pasan, ia kembali ke kampung halamannya. Hingga dipercaya menjadi Sekertaris Desa mulai pada tahun 1999 yang membuatnya banyak berurusan dengan surat-surat penting yang terkait dengan penduduk desanya. Tidak jarang orang-orang sangat bergantung padanya, sehingga semakin meningkat rasa hormat warga dan mendudukkan posisi sosialnya lebih tinggi.

Assituruseng menuntut ambisi dan prestasi di nomorduakan digantikan oleh kerjasama dan dikalahkan oleh upaya untuk mencapai kehidupan bersama yang tenang. Dalam nilai ini, gaya hidup yang tidak kenal puas dan kadang-kadang tampak berlebihan dikalangan orang kaya baru, gaya hidup yang lebih sering mengabaikan aspek hormat diterima dengan sikap skeptis. Orang slaing mengawasi moral orang lain, agar mereka tidak mengganggu harmoni -- saling kesepahaman yang sudah terbangun- dalam lingkungan sosial. Karakteristik emosional di Belawa kadang-kadang cukup ekspresif dalam menyikapi perihal tersebut. Namun yang patut diperhatikan adalah orang-orang yang bekerja dengan tanda-tanda yang halus dan nyaris tersembunyi bukannya tampil dengan gestur-gestur besar. Tindakan-tindakan yang jika sepintas diperhatikan

sebagai getaran-getaran emosional yang kecil bisa merupakan ledakan emosi besar.

Terkadang orang-orang desa di Belawa merasa malu saat menyapa orang asing atau yang posisinya lebih tinggi. Bagi mereka jauh lebih baik tidak menampakkan diri dan merendahkan diri daripada menunjukkan keinginan-keinginan pribadi dan bersikap tidak sopan. Apabila tidak terhindarkan lagi untuk bertemu dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka sebaiknya pertemuan itu dilangsungkan secara beramai-ramai dan penghormatan yang bersifat publik pada kedua pihak. *Masiri-siri* atau malu-malu sebenarnya merupakan sifat yang positif; lebih baik menahan diri daripada memaksakan kehendak, dan untuk memelihara dengan berbagai cara tatanan dalam masyarakat, termasuk ketika terdapat ikatan-ikatan *assituruseng*. Orang yang tidak memiliki perasaan malu hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan dampak-dampak dari ucapannya ataupun keinginan pribadinya.

Bahasa dan tuturan orang-orang Belawa kadang menunjukkan dan memperkuat perbedaan status. Penghormatan yang diperoleh seseorang melalui bahasa menunjukkan status seseorang tetapi juga kepekaan sosial dan kemampuan kontrol dirinya (Keeler dalam Antlov 2002:157). Mampu menguasai semua tingkatan bahasa dianggap sebagai prestasi yang baik, saya mengambil contoh seorang pemilik toko bangunan di Belawa, Haji Sulaeman. Ketika akan membeli barang di tokonya, kalimat yang akan di respon baik adalah '*degaga paku ta balu?*' (apakah 'ada' atau 'tidak ada' paku yang anda jual?), sebaliknya jika bertanya dengan kalimat '*engkaga paku ta balu*' (ada paku yang anda jual?) sungguh akan dia akan melayani dengan ogah-ogahan. Pengertian sama dalam kalimat, tetapi dimaknai berbeda oleh Haji Suleman tentang barang yang akan dibeli sebaiknya dikira dulu 'ada' atau 'tidak' sebelum memastikan 'ada' barang yang akan dibeli, selain itu kalimat pertama merupakan tingkat yang lebih halus.

Tidak jauh berbeda dengan kasus Khalik dan para *anakarung* yang masih cukup dominan di Desa Wele. Betapapun ia melakukan penolakan terhadap keinginan *anakarung* yang dianggapnya telah melanggar peraturan-peraturan desa. Ia tetap berusaha memasuki ruang konsensus dimana arena atau strukturnya terdapat suatu pelapisan sesuai dengan karakteristik budaya Bugis yang halus ketika membicarakan polemiknya. Kecenderungan akan berbeda ketika Khalik membahasakan penolakannya secara keras atau melebihi batas 'etis' dalam bahasa individu yang bukan dari kelompok *anakarung*. Jika Khalik salah menempatkan penegasannya terhadap peraturan desa dan tidak sesuai dengan

bentuk-bentuk komunikasi antara *to-sama* dengan *anakarung*. Hal tersebut dapat menimbulkan reaksi yang berbeda bagi kelompok *anakarung*. Dari sinilah kerumitan karakteristik budaya orang Belawa, manakala perihal yang 'normatif' berpadu dengan 'kebiasaan' lokal. Sekertaris Desa berhadapan dengan dominasi *anakarung* pada tataran budaya.

Mekanisme ini berjalan halus sehingga yang didominasi tidak sadar, patuh dan menerima begitu saja. Mekanisme yang semacam ini kemudian disebut sebagai kekerasan simbolik –istilah yang dipopulerkan oleh Bourdieu (dalam Fashri 2007:106). Dengan demikian, kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang di baliknya menyembunyikan relasi kekuasaan. Kekerasan simbolik bekerja dengan menyembunyikan pemaksaan dominasi untuk menjadi sesuatu yang diterima sebagai 'yang memang seharusnya demikian'. Inilah yang kemudian membuat mereka terdominasi menjadi tidak keberatan atau "ikhlas" untuk dikuasai dan berada dalam lingkaran dominasi. Pada akhirnya. Praktik budaya kelas yang didominasi lebih tertuju untuk meniru gaya hidup kelas dominan daripada mendefinisikan praktik budaya mereka sendiri.

6. Kesimpulan

Budaya aspek salah satu aspek penaklukan secara konseptual merupakan kekuatan hegemonik. Ketika hubungan *arung* atau elit (pemimpin) dengan masyarakat (pengikut) yang didasarkan pada nilai-nilai lokal maka dapat diinterpretasi sebagai bentuk dominasi. Akan tetapi motif pelapisan sosial ini terdapat di dalam *assituruseng* (persetujuan) antara orang yang berkuasa dan orang yang dikuasai merupakan hubungan yang didasarkan pada *ajjoareng* (*patron-klien*). Dominasi umumnya secara simbolik ditandai dengan keunggulan status sosial, pengetahuan, senioritas dan ekonomi. Dengan demikian subordinasi dan *assituruseng* tidak boleh secara keliru diartikan sebagai persetujuan terhadap apa yang nyata-nyata tidak mungkin dihindarkan ataupun ditaklukkan. Kecenderungan ini tidak dengan sendirinya merupakan tanda prestis tapi merupakan simbol kekuatan nilai-nilai budaya yang hegemonik.

Karena orang-orang yang didukung oleh narasi budaya mampu menguasai arena politik di Belawa, begitu pula kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya harus dianalisa sebagai instrumen strategis untuk menghadapi ketidakseimbangan dan dominasi. Apabila diperintahkan, ataupun perintah halus, orang akan patuh dan lepas dari perkara apakah mereka 'mau atau tidak'. Para

kelompok elit dengan demikian dapat diterima dipermukaan sekedar untuk mendatangkan harmoni, tetapi *assituruseng* (kesepakatan) yang sebenarnya tidak mudah dicapai.

Munculnya konsepsi budaya politik dalam kelompok masyarakat di Belawa merupakan implikasi dari pemahaman kebudayaan setempat yang lebih kompleks dalam warna pada pandangan dan cara masyarakatnya memainkan peran dalam pranata politik. Pada era modern ini, kekhasan tersebut muncul dalam cara masyarakat lokal semisal dalam cara suatu kelompok masyarakat mengelola pengetahuan mereka dan cara mereka menghadapi masalah dalam praktik politik seperti legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan kelompok pemimpin-pengikut (*ajjoareng*). Meski dalam sistem kenegaraan yang ada di Indonesia berlaku sistem politik yang lebih banyak dipinjam dan berasal dari luar negeri, tetapi karakteristik budaya lokal dalam orientasinya dengan praktik politik justru menyesuaikan dan malah menyuburkan praktik-praktik budaya lokal di Indonesia dengan keberagaman kebudayaan di setiap sudut wilayahnya.

Hasil penelitian ini sepenuhnya berkontribusi pada pemikiran tentang tema perubahan budaya yang menjadi agenda utama untuk mengkonstruksi budaya baru. Namun dalam penelitian ini belum memahami dan menganalisis kompleksitas dimensi psikologis dari kekuasaan politik yang beroperasi pada nilai lokal, dan bagaimana dimensi-dimensi tersebut memproduksi diri di rumah atau tempat-tempat lain. Begitu pula tentang kajian sosial-kultural yang terkait dengan intervensi negara terhadap kebudayaan lokal menjadi kekurangan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal. (1985). *Wajo Abad XV – XVI*. Bandung: Penerbit Alumni
- Almond, Gabriel dan Verba, Sydney. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di 5 Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Anderson, Benedict R. O’G. (1990). *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabaru.
- Antlov, Hans. (2002). *Negara Dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal* (terj). Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Arifin, Indar. (2010). *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Bakti, Andi Faisal. (2007). *Diaspora Bugis Di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Innawa.
- _____. (2009). Kekuasaan Keluarga di Wajo Sulawesi Selatan dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.) *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 491-504.
- Bourchier, David. (2010). Kisah Adat Dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini dalam James J Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga (ed.). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 125-164.
- Fashri, Fauzi. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- McGlynn, dan Arthur Tuden. (2000). *Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik*. Jakarta: UI Press
- Meiyani, Eliza. (2008). *Bati Na Wija Dalam Sistem Kekerabatan Orang Bugis-Bone: Suatu Analisis Antropologi Sosial*. Disertasi. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Millar, Susan. (2009). *Perkawinan Bugis: Refleksi Status Sosial dan Dibalikinya*. Makassar: Innawa.
- Nordholt, Schulte. (2002). *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta.
- Pelras, Christian. (2005). 'Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas' dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni. (ed.), *Tapak-Tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa, 37-51.
- _____. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta- Paris (EFEO).
- Rahim, Abdul R. (2011). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Robinson, Kathryn. (2005). 'Pendahuluan dan Pengantar Tentang Konferensi' dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni (ed.), *Tapak-Tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa, 7-36.
- Rudiansjah, Tony. (2009). *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subijanto, Rianne. (2014). *Ruang Publik: Dulu dan Sekarang*. LKIP Indoprogress (artikel). Edisi Ke-16 5 April 2014 dalam <http://indoprogress.com/2014/04/ruang-publik-dulu-dan-sekarang/> diakses tanggal 27 Juli 2015

- Strinari, Dominic. (2009). *Populer Culture: Pengantar Menuju Budaya Populer*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tahara, Tasrifin. (2014). *Melawan Streotip: Etnografi, Reproduksi, Identitas dan Dinamika Masyarakat Katobengke Yang Terabaikan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusuf, A.M. (2012). *Reproduksi Status Tradisional Dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo*. Skripsi: Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Zuhro, S., Sumarno, Wenny Pahlemy, Nurul Rochayati, Lilis Mulyani, dan Israr Iskandar (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.